

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses multidimensional karena pembangunan ekonomi berdampak pada kinerja ekonomi suatu daerah atau negara. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga mengurangi tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang rendah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif tinggi. Kemiskinan menjadi masalah yang menghambat pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah sehingga menjadi perhatian dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama 189 negara anggota membuat dan mendeklarasikan sebuah kebijakan yang dapat menurunkan kemiskinan yaitu program pembangunan milenium sehingga 189 negara anggota PBB dituntut untuk menanggulangi kemiskinan sesuai target yang telah di buat bersama (UNDP, 2012). Suatu negara atau daerah memiliki strategi dan instrumen kebijakan yang berbeda-beda untuk mengurangi kemiskinan, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengoptimalkan secara efektif sektor yang menjadi andalan pembangunan nasional di masing-masing negara atau daerah (Andriana,2016:86).

Penyebab kemiskinan sangat multidimensional. Menurut Adenike (2014:32), penyebab kemiskinan dikategorikan ke dalam lima dimensi. Ruang lingkup lima dimensi, yaitu mencakup dimensi personal dan physical, ekonomi, sosial, kultural, dan politik. Dimensi personal dan *physical* menjelaskan bahwa

kemiskinan diakibatkan oleh kesehatan yang buruk dan kekurangan gizi, infrastruktur ekonomi dan lingkungan alam yang tidak menguntungkan, keterbatasan pendidikan, stres, depresi, kehilangan harga diri, kehilangan ambisi dan aspirasi. Dimensi ekonomi menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan karena pendapatan yang diperoleh kurang untuk mencapai kebutuhan dasar. Dimensi sosial menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan hambatan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik dan ekonomi sosial. Dimensi kultural menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan karena kualitas budaya. Dimensi politik menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan kesalahan sistem politik.

Faktor penyebab kemiskinan menurut Arsyad (2010:278), “kemiskinan dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang bersifat alamiah atau kultural dan hal-hal yang bersifat non alamiah atau struktural”. Menurut Paul Spicker (dalam Wijayanto, 2010:64) penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dalam empat mazhab, yaitu *individual explanation*, *familial explanation*, *subcultural explanation*, *structural explanation*. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kemiskinan bisa datang dari diri sendiri (faktor alamiah), dan dari lingkungan sekitar (faktor non alamiah).

Jumlah penduduk miskin antar provinsi di Indonesia berbeda, yang menjadi sorotan adalah jumlah penduduk miskin provinsi di pulau Jawa yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di luar pulau Jawa. Padahal setiap provinsi memiliki akses dan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Kemiskinan di pulau Jawa antar provinsi juga berbeda. Menurut BPS Indonesia menunjukkan jumlah penduduk miskin provinsi Jawa Timur tahun 2015

menempati urutan pertama. Padahal Jawa Timur mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional secara signifikan, yakni mencapai 14,8% terhadap total perekonomian Indonesia. Jawa Timur merupakan pusat perekonomian bagi wilayah timur Indonesia. Jawa Timur juga memiliki industri besar baik berskala Nasional maupun Asia Tenggara.

Pemerintah provinsi Jawa Timur sudah menetapkan berbagai kebijakan melalui berbagai program, untuk menekan tingkat kemiskinan. Ada dua cara yang dilakukan untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, yaitu mengurangi beban biaya bagi rumah tangga sangat miskin dan meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin.

Untuk mengurangi beban biaya bagi rumah tangga miskin pemerintah mengambil kebijakan dengan membantu biaya pendidikan, biaya kesehatan, bantuan langsung tunai, miskin serta infrastruktur seperti air bersih, jalan desa dan sebagainya guna meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin. Pemerintah melakukan pelatihan ekonomi produktif, usaha ekonomi, stimulant modal kerja/usaha (koperasi wanita), pasar desa dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan produksi melalui Teknologi Tepat Guna.

Pada saat ini lahan pekerjaan manusia sudah banyak digantikan oleh mesin dan menyebabkan banyaknya pengangguran menurut (Sukirno:2006:32) penambahan tenaga kerja akan mengakibatkan banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Kejadian tersebut akan menambah daftar penduduk miskin di Jawa Timur.

Menurut Soekirno (2006:34) pengangguran adalah “seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan”. Irawan (2002:46) mendefinisikan pengangguran adalah mereka yang berada dalam umur angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku”. Sedangkan menurut Suparmoko (2007:128) pengangguran adalah “ketidak mampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan atau inginkan”. Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki, namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan mereka belum mendapat pekerjaan sesuai dengan yang mereka inginkan.

Meskipun demikian kemiskinan masih menjadi masalah pemerintahan Provinsi Jawa Timur, pemerintah seharusnya tidak melihat dari segi mikro saja dalam menekan kemiskinan tapi juga harus melihat dari segi makro, mulai dari jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013:26) Menjabarkan “penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”.

Sedangkan menurut Said (2001:16), yang dimaksud dengan penduduk adalah “jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu

dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.”

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu yang dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya proses kelahiran, kematian, dan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain

Jumlah penduduk Jawa Timur yang tinggi dan terus bertambah, dimana Jawa Timur menyumbang jumlah penduduk kedua terbesar setelah Jawa Barat. Teori Malthus dalam Skuosen (2009:85) pada intinya menyatakan bahwa sumber daya bumi tidak bisa mengimbangi kebutuhan populasi yang terus bertambah, akibatnya kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya alam yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia bersifat terbatas, hal ini akan mendorong manusia mendekati garis kemiskinan karena persaingan yang cukup ketat dalam pemenuhan kebutuhan.

Menurut BPS (2011:29), pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar di segala tingkatan baik formal maupun informal. Menurut Purwanto (2010:34-35) pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan pada anak oleh orang tua dewasa secara sengaja agar menjadi dewasa. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No.20 Tahun 2003). Fungsi pendidikan

menurut Rahaju dkk (2004:82) di fokuskan pada tiga fungsi pokok pendidikan yaitu, pendidikan sebagai penegak nilai, sarana pengembang masyarakat, dan upaya pengembangan potensi manusia.

Menurut Ihsan (2008:74), ada empat macam fungsi pendidikan secara makro, yaitu pengembangan pribadi, pengembangan warga Negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa. Sedangkan dalam arti mikro adalah membantu perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Menurut BPS (2012) Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu.

Dunia pendidikan di Jawa Timur khususnya penduduk yang mengalami buta huruf masih cukup tinggi, dimana 11,98 persen penduduk Jawa Timur umur 15 tahun keatas masih mengalami buta huruf, pada era globalisasi saat ini pendidikan merupakan salah satu tolak ukur dalam mendapatkan pekerjaan. Pendidikan berfungsi menyiapkan salah satu input dalam proses produksi. Hal ini selanjutnya akan mendorong peningkatan output yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan penduduk (Mulyadi:2008:153).

Menurut data dari BPS Indonesia menunjukkan jumlah partisipasi sekolah di Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan 2010-2015. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang mewajibkan wajib belajar 12 tahun, maka mewakili masing-masing tingkat pendidikan yaitu SD, SMP, SMA memiliki nilai partisipasi yang rendah. Melihat kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kurang berminat dalam melanjutkan studi ketingkat yang lebih tinggi. Kebanyakan dari

mereka tidak melanjutkan pendidikan disebabkan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk melanjutkannya. Faktor lain yaitu usia semakin tidak muda lagi menyebabkan malas untuk belajar kembali.

Ketimpangan pendapatan juga dapat mempengaruhi kemiskinan. Hubungannya antara ketimpangan pendapatan dengan kemiskinan berbanding lurus. Ketimpangan pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia baik di negara maju maupun negara berkembang yang juga merupakan isu penting untuk ditinjau (Kalalo dkk, 2016:102). Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat (Rifafi, 2005:203). Masalah ketimpangan pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas antar daerah . proses distribusi pendapatan yang tidak merata akan mendorong ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga kemiskinan juga akan tinggi.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah studi ini sebagai berikut:

1. Apakah variabel PDRB, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur?
2. Manakah antara variabel PDRB, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan yang berpengaruh lebih besar terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini pada dasarnya memiliki sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel PDRB, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan secara simultan dan parsial terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui manakah yang berpengaruh lebih besar antara variabel PDRB, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan dan pengembangan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan atau mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dan diharapkan dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.
3. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat umum sebagai salah satu informasi mengenai tingkat kemiskinan khususnya di Jawa Timur.